

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENJALANKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH
DI DESA PASARBARU PANGEAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

*Syarat Mencapa Gelar Sarjana Sosial
Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Social
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Negara*



Oleh :

**DWI INDAH AL CHALIK
NPM. 220411023**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SEKRETARIS



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Pembimbing I)



2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I)



3. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENJALANKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR
BERSIH DI DESA PASAR BARU PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
NAMA : ALPIYANDRI
NPM : 190411051
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA :DWI INDAH AL CHALIK

NPM : 220411023

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 16 April 2026



DWI INDAH AL CHALIK
NPM. 220411023

MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”*

(Q.S Al-Baqarah:286)

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S al-Insyirah:5-6)

“Jangan biarkan perkataan mereka membuatmu sedih.”

(Q.S Yunus:65)

“Bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa berharga prosesnya”

(Penulis)

*“Jangan tumbang sebelum semuanya tercapai. Ingat, semua ini untuk orang tua
demi orang tua.”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. *Di atas lembaran yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:*

Cinta Pertama dan panutanku, Papa Iman Chalik dan pintu surgaku Mama Heldawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Terimakasih telah menjadi alasan dibalik setiap tetes keringat dan lelah yang terbayar. Beliau adalah alasan terbesarku untuk terus bertahan sampai sejauh ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, tidak kenal lelah dalam mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi sedikit hadiah indah untuk papa dan mama. Semoga Papa dan Mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,



Dwi Indah Al Chalik
NPM.220411023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli’ala Muhammad Wa’alaahi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program Penyediaan Air Bersih (PAB) Di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat menngharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk semua pihak atas kesuksesan penulis menulis skripsi ini.

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani S.Pdi., M.Pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singing.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing
3. Bapak Alsar Andri S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa memberikan masukan serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing 1 saya yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan.
6. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Kepada tante saya, Terimakasih telah menjadi sosok yang luar biasa dalam setiap langkah perjalananku. Terimakasih untuk selalu ada dan senantiasa memberikan semangat agar saya tidak pernah menyerah. Keberhasilan ini adalah buah dari doa dan dukungan yang tulus dari tante.
8. Keluarga besar, atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan di setiap langkahperjuangan ini. Terimakasih untuk kehangatan dan ketulusannya.
9. Saudaraku, Firdaus Al Chalik, S.P. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
10. Sahabat serta Sepupu tersayangku sedari kecil, Selvia Triwahyuni, Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup peneliti, Terimakasih selalu ada, selalu menemani serta menyaksikan segala perjuangan peneliti dalam hal apapun. Terimakasih sudah menjadi bahu tempat ku bersandar, serta tempat ku mengadukan hal apapun. Terimakasih untuk segala semangat, doa dan dukungan yang selalu di berikan.
11. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Maya Afrilia, Nina Suriani, Nesya audiya Rinaldi, Lian Anggraini dan Misel Sulastu Ningsih. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terimakasih untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karna telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on to, guys!*

12. Terakhir penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Dwi Indah Al Chalik. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang telah menemani setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, merupakan harapan besar bagi penulis bila skripsi ini dapat memberikan masukan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Teluk Kuantan, 2025



Dwi Indah Al Chalik
Npm.220411023

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik	13
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi.....	16
2.1.4 Teori/Konsep Organisasi	21
2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa	23
2.1.6 Konsep Penyediaan Air Bersih	26

2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
2.3 Hipotesis.....	29
2.4 Defenisi Operasional	29
2.4.1 Komunikasi.....	29
2.4.2 Sumber Daya	29
2.4.3 Disposisi	30
2.4.4 Struktur birokrasi	30
2.5 Operasional Variabel	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Informan	32
3.3 Sumber Data	33
3.3.1 Sumber Data Primer	33
3.3.2 Sumber Data Sekunder	33
3.4 Fokus Penelitian	33
3.5 Lokasi Penelitian.....	34
3.6 Metode Pengambilan Data.....	34
3.6.1 Observasi	34
3.6.2 Wawancara.....	34
3.6.3 Dokumentasi	34
3.6.4 Triangulasi	35
3.7 Metode Analisis Data	35
3.7.1 Reduksi Data.....	35
3.7.2 Sajian Data.....	36
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	36

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Sejarah Kantor Penyediaan Air Bersih PAB	38
4.1.1 Gambar Struktur Organisasi	38
4.2 Kondisi Geografis PAB.....	40
4.3 Visi dan Misi Kanto PAB	41
4.3.1 Visi.....	41
4.3.2 Misi	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Identitas Responden.....	42
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	43
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
5.2 Hasil Pembahasan Penelitian Analisis Kebijakan pemerintah dalam menjalankan program Penyediaan air bersih di desa pasarbaru pangean kabupaten kuantan singingi	44
5.2.1 Komunukasi	45
5.2.1.1 Kejelasan.....	45
5.2.1.2 Tujuan	46
5.2.2 Sumber Daya.....	47
5.2.2.1 Staff.....	48
5.2.2.2 Finansisal	49
5.2.3 Disposisi	49
5.2.3.1 Kejujuran	50
5.2.3.2 Komitmen	50

5.2.4 Struktur Birokrasi.....	51
5.2.3.1 Karakteristik	51
5.2.3.2 Norma	52
5.3.1 Komunikasi	53
5.3.2 Sumber Daya.....	54
5.3.3 Disposisi	54
5.3.4 Struktur Birokrasi.....	55
5.4 Kriteria Penilaian	55
5.5 Analisis Hasil Penelitian	56
BAB VI PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	58
6.2.1 Kepala UPTD PAB Teluk Kuantan	58
6.2.2 Pegawai/pengelola PAB	58
6.2.3 Pelanggan PAB	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Jumlah Pelanggan PAB Unit Pangean	2
Tabel I.II Jumlah Pelanggan PAB dari Tahun 2021-2025	3
Table II.I Konsep, Indikator dan Penilaian	28
Tabel III.I Informan Penelitian	32
Tabel III.II Jadwal Kegiatan Penelitian	37
Tabel V.I Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel V.I Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel V.I Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar IV.I Struktur Organisasi PAB	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam
Kuantan Singingi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Penelitian Dari Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
- Lampiran 3 : Surat Riset
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Reset Di Desa
Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara Penelitian
- Lampiran 6 : Catatan Bimbingan Proposal
- Lampiran 7 : Catatan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA PASARBARU PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DWI INDAH AL CHALIK
NPM.220411023

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAB dalam hal Infrastruktur air bersih yang ada di desa Pasar Baru Pangean, kurang ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari Aliran air yang sering macet, dikarenakan sumber pasokan tenaga mesin PAB dari Perusahaan listrik Negara (PLN). Ketika listrik mati maka PAB tidak beroperasi, dan Pipa aliran air yang sering bocor, karna berada di tepi jalan raya yang sering dilalui kendaraan berat, selain itu faktor usia pipa yang sudah tua sejak tahun 1995 sampai sekarang belum ada pergantian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Pasar Baru Pangean, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Pasar Baru Pangean, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Pasar Baru Pangean Kec. Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih mengalami permasalahan jam operasional, serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Air Bersih.

ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY IN IMPLEMENTING THE CLEAN WATER SUPPLY PROGRAM IN PASAR BARU PANGEAN VILLAGE, KUANTAN SINGINGI REGENCY

DWI INDAH AL CHALIK
220411023

The government policy on the management of PAB in terms of clean water infrastructure in the village of Pasar Baru Pangean, there is a lack of maintenance efforts, this can be seen from the water flow that is often jammed, due to the source of the PAB engine power supply from the State Electricity Company (PLN). When the electricity goes out, the PAB does not operate, and the water flow pipes often leak, because they are on the edge of the highway that is often passed by heavy vehicles, in addition to the age factor of the old pipes since 1995 until now there has been no replacement. The purpose of this study is to find out and describe the implementation of village government policies in clean water management in the village of Pasar Baru Pangean, which is studied through: resources, namely: human resources of village government officials and administrators of the village clean water management unit and supporting facilities that support the management of clean water in the village of Pasar Baru Pangean, bureaucratic structure, namely: concerning how work is divided, grouped, and coordinated formally, the results of the study show that the village government policy in clean water management in the village of Pasar Baru Pangean, Kec. Pangean Kuantan Singingi Regency is not yet as expected, this can be seen from the following things: Human Resources Apparatus/Officers clean water management still experience problems with operational hours, as well as supporting facilities in the implementation of clean water management that are not yet adequate, the tools needed by officers in recording and data collection, written instructions, to officer incentives that cannot be received directly, so that the implementing officers must use their own funds first, even though there will be reimbursement later, this is quite an obstacle to implementation in the field.

Keywords: Government Policy, Clean Water Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Banyak kegiatan yang dilakukan manusia yang sangat bergantung dengan ketersediaannya. Namun, dengan semakin bertambahnya penduduk tekanan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air semakin meningkat dan berubah menjadi masalah lingkungan.

Manusia dan semua makhluk hidup membutuhkan air sebagai salah satu sumber kehidupan. Dengan kata lain, air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan.

Negara Indonesia yang masuk 10 besar jumlah penduduk di dunia tentunya rakyat Indonesia membutuhkan makan dan minum, sebagai kebutuhan pokok yang utama, banyak jenis makanan dan minuman yang ada di Indonesia sebagai makanan pokok, dan berbagai merek minuman yang berfarian, seperti air mineral (air dalam kemasan). Hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok penunjang kebutuhan hidup. Air sebagai sumber kehidupan makhluk hidup terutama manusia yang berkembang dengan berbagai macam kebutuhan dasar manusia (*basic human need*). Air menjadi kebutuhan primer yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak, mandi sampai

kebutuhan pengolahan industri, sehingga fungsi air tidak hanya terbatas untuk menjalankan fungsi ekonomi saja, namun juga sebagai fungsi sosial.

Fungsi sosial ini erat berkaitan dengan kondisi air yang sehat, jernih, dan bersih sehingga sangat penting dipahami oleh semua pihak dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penyediaan Air Bersih (selanjutnya disingkat PAB) merupakan program dinas cipta karya dan tata ruang dengan jumlah pelanggan 308 dari 4 dusun yang ada di desa Pasarbaru Pangean yang mampu dilayani oleh PAB unit Pangean yakni Dusun Pasar, Dusun Bunga Tanjung, Dusun Penghijauan dan Dusun Remaja, dengan jumlah pelanggan terbanyak di dusun Pasar, rata-rata penggunaan air perumah adalah 10 kubik, perhari sebanyak 123 kubik dengan jumlah keseluruhan kebutuhan masyarakat 3.702 kubik perbulan, yang dikelola oleh ketua PAB unit Pangean a.n. Zulpan Andespa S.P.i dan 1 (satu) operator a.n. Andri Marti Supardi serta pengelolaan keuangan PAB unit Pangean yang disetorkan ke UPTD Teluk kuantan dengan Tarif perkubik Rp. 1.800 dan dikomandokan oleh PAB Pusat Kota Teluk Kuantan. Berikut ini adalah table jumlah pelanggan PAB di setiap dusun di desa Pasarbaru Pangean.

Tabel I.I : Jumlah Pelanggan PAB Unit Pangean

Jumlah pelanggan PAB setiap dusun di desa Pasarbaru Pangean				
No	Nama Dusun	Jumlah Pelanggan		Jumlah Keseluruhan
		Aktif	Tidak Aktif	
1	Dusun Pasar	30	20	50
2	Dusun Bunga Tanjung	113	28	141
3	Dusun Penghijauan	49	12	61
4	Dusun Remaja	54	2	56

Sumber : PAB Unit Pangean tahun 2025

Sejak 5 Tahun terakhir PAB unit pangean jumlah Pelanggan PAB unit Pangean Tahun 2021 – 2025.

Tabel I.II : Jumlah Pelanggan PAB unit Pangean dari Tahun 2021 – 2025

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang PAB Unit Pangean di Kecamatan Pangean					
Jumlah pelanggan PAB unit Pangean dari tahun 2021-2025.	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
	308 Pelanggan	308 Pelanggan	308 Pelanggan	308 Pelanggan	308 Pelanggan

Sumber : PAB Unit Pangean tahun 2025

Dari daftar table I.II diketahui PAB, Ternyata belum mampu mengaliri seluruh rumah masyarakat yang berada di desa Pasarbaru Pangean dengan jumlah sekitar 1.051 kepala keluarga, dikarenakan kapasitas mesin yang kecil, umur mesin yang telah tua dan belum ada perbaikan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh mahluk hidup di dunia ini termasuk manusia. Tanpa air, manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan hidupnya, maka dari itu pengolahannya harus diatur sedemikian rupa sehingga agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Air adalah sumber daya nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pengolahannya diatur dan dipegang oleh pemerintah hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, adalah landasan hokum utama penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, yang

mengatur pembagian urusan pemerintah (absolut, konkuren, umum), asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta hubungan pusat dan daerah. UU ini menekankan efisiensi pelayanan publik dan inivasi daerah.

Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam hal nya tanggung jawab pemerintah pusat disebutkan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan suplai air bersih adalah pada pemerintah daerah.

PAB merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia air bersih dengan jumlah air yang disediakan PAB tidak terbatas. Salah satu tujuan dibentuknya PAB adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, pengembangan sarana dan prasanana serta distribusi air bersih, sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. Selain fasilitas air bersih yang harus dipenuhi, diperlukan juga pelayanan yang baik untuk mendukung fasilitas air yang telah disediakan PAB Unit Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Perusahaan publik yang ada di daerah, sangat diperlukan kehadirannya bagi masyarakat, demikian pula halnya pentingnya keberadaan PAB Unit Pangean di Desa Pasarbaru Kecamatan Pangean. Desa Pasarbaru Pangean merupakan bagian dari Kecamatan Pangean yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuantan

Hilir, namun wilayah Pangean sendiri sudah lama menjadi kawasan pemukiman. Desa Pasarbaru Pangean dengan Jumlah penduduk 3882, laki-laki 1938 dan perempuan 1944 berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibentuk pada tahun 1999. Sehingga menjadikan Desa Pasarbaru Pangean sangat cocok untuk pembangunan bendungan, pada Tahun 1988 didirikan sebuah bendungan dengan Nama Pauh Pangean Guna mengaliri lahan Pertanian, Perikanan, konsumsi Rumah Tangga dan PAB. Yang awal mulanya berdiri pada tahun 1995 dengan beberapa kali mengalami pergantian nama, sehingga pada tahun 2016 kemudian tentukan dengan Nama PAB unit Pangean sampai sekarang.

Pemerintah desa telah meluncurkan berbagai program nasional seperti PAB untuk meningkatkan akses air bersih di wilayah pedesaan, termasuk di Kecamatan Pangean, dengan tujuan memperluas layanan bagi masyarakat miskin melalui pengelolaan berbasis masyarakat. Di tingkat lokal, pemerintah desa dan kecamatan berperan dalam implementasi kebijakan ini, termasuk pembangunan sarana prasarana, evaluasi rutin, dan kolaborasi dengan depot air murah, meskipun tantangan seperti kualitas air baku yang buruk dan tarif rendah menghambat investasi. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi, mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya SDM dan koordinasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

Pemasangan Kilometer atau Meteran Pipah Air sudah terpasang di setiap rumah-rumah masyarakat yang menjadi pelanggan PAB, ini menjai ukuran berapa besaran biaya pelanggan akan dikenakan tariff setiap bulan didalam mengkonsumsi air yang disediakan oleh PAB unit Pangean. Untuk melakukan

pembayaran bulanan masyarakat bisa membayar di kantor PAB di jl. Jend, Sudirman, Pasarbaru, Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Kantor ini buka pada setiap hari jumat pada pukul 08:00 wib sampai dengan 11:30 Wib.

PAB di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan akses air bersih yang memadai, dengan sumber air baku utama dari Sungai Indragiri atau Batang Kuantan. Faktor utama mencakup keterbatasan cakupan layanan sebelumnya, di mana target pelayanan di Pangean hanya mencapai sebagian kecilmah tangga, serta tantangan lingkungan sosial-ekonomi seperti rendahnya tarif yang menghambat investasi dan ekspansi sambungan baru.

Harapan PAB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ternyata belum sejalan dengan kenyataan dikarenakan pelanggan masih banyak mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh pihak PAB, seperti

1. Aliran air yang sering macet, dikarenakan sumber pasokan tenaga mesin PAB dari Perusahaan listrik Negara (PLN). Ketika listrik mati maka PAB tidak beroperasi
2. Air ketika di endapkan berlumpur, dikarenakan saringan air yang masih kurang bagus dan belum ada perbaikan.
3. Pelanggan tidak menggunakan air untuk memasak dan minum, mereka hanya menggunakan air PAB untuk mandi dan mencuci. Untuk memasak dan minum, para pelanggan PAB membeli air kemasan, air sumur dan galon.

Tabel I.III : Pendapatan PAB dan pengeluaran PAB

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	Rp3.000.000,- – Rp4.000 000,-
2	Pengeluaran	Rp1.000.000,- – Rp1.500.000,-

Sumber : PAB unit Pangean

4. Pipa aliran air yang sering bocor, karna berada di tepi jalan raya yang sering dilalui kendaraan berat, selain itu faktor usia pipa yang sudah tua sejak tahun 1995 sampai sekarang belum ada pergantian.

PAB mengambil sumber air dari bendungan pauh Pangean, dengan sumber tenaga dari pasokan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang hidup mulai pada pukul 10:00 wib sampai dengan 16:30 Wib. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan peneitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam menjalankan program PAB di Desa Pasarbaru Pangean”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalahnya adalah : “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program PAB di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjalankan program PAB di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan juga wawasan, dalam hal ini mengenai PAB

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan kebijakannya dalam menjalankan dan melaksanakan program PAB di Desa Pasarbaru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Jhon M. Pffifner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2003 : 31) administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

Adminnistrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Felix A. Nigro dan Lloy G. Nigro (dalam Syafiie, 2003 : 32) administrasi negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.

Administrasi negara meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif serta hubungan antara mereka.

Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

Administrasi negara sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi negara dalam berbagai hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Menurut Prajudi Admosudirdjo (dalam Syafiie, 2003 : 32) administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Arifin Abdulrachman (dalam Syafiie, 2003 : 32) administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafiie, 2003 : 32) administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2003 : 33) administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Manurut George J. Gordon (dalam Syafiie, 2003 : 33) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Syafiie, 2016 : 3) secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah adalah pengetahuan

(*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan mennggukan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Menurut Sondang P Siagian (dalam wirman syafiie, 2012 : 9) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Hadart Nawawi (dalam syafiie, 2016 : 14) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Sumantri (dalam Syafiie, 2016 : 20) negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karnanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Menurut Suwarno (dalam Afifuddin, 2012 : 2-4) memberikan pengertian adminstrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Menurut R.D.H. Kusumaatmadja (dalam Ragawino, 2006 : 18) mengatakan bahwa administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti : Dalam arti sempit : administrasi adalah kegiatan tulis menulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. Dalam arti luas : administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah suatu bentuk proses usaha yang di mulai menciptakan instrument pengaturan kemudian digunakan untuk melahirkan keteraturan dalam melaksanakan kegiatan pada manusia kelompok tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama. Administrasi dalam artian luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagai mana di tentukan dalam struktur dengan mendaya gunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

James E. Anderson (1979 : 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan politik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.

Menurut Thomas Dye (1981 : 1) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh ketika pemerintah mengetahui ada jalan raya yang rusak dan tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.definisi kebijakan dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Menurut Charles O. Jones (1996 : 296), kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau Keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, Keputusan, standar, proposal, dan grand design.namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang. Namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah dipaparkan diatas, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Budiarjo (dalam Duryat, 2022 : 3) bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan menurut Anderson (dalam Ali Imbron, 2002 : 13) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Syafaruddin (dalam Duryat, 2022 : 3) kebijakan adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manager dan personal dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.

Kebijakan menurut Anderson (dalam Ali Imbron, 2002 : 13) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Edi Suharto, 2007 : 4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2006 : 7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dia maksud.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino, 2006 : 6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014 : 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, kauntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan –tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Menurut Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002 : 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan

kegiatan. Jadi implementasi dapat juga diartikan mempresentasikan hasil desain kedalam pemograman.

Menurut Agustino, (2017 : 126) implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penerjemahan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Sedangkan menurut Lester dan Steward (dalam Winarno, 2012 : 147) implementasi kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Indiahono (2017 : 143) implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes

seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 21) Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver Policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok Sasaran (*target grup*) grup untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Deddy Mulyadi (2016 : 36) Mengemukakan bahwa implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Adapun proses pendekatan implementasi kebijakan public dapat dilakukan dengan 2 (dua) faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan di implementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2014 : 657) mengemukakan bahwa implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut.

Terdapat berbagai model implementasi kebijakan salah satunya model implementasi kebijakan salah satunya model implementasi kebijakan – Van Meter & Van Horn yaitu : model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Meter & Van Horn di sebut dengan istilah *A model of policy implementation*, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi peformasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya dengan sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dan keputusan public yang tersedia, pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik .

Selanjutnya, model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Dwiyanto indiahono 2016 : 31) :

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward Menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

2.1.3.1 Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik. Ini menjadi penting karna semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam pengaplikasian program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2.1.3.2 Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya, manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang data melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam

implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya financial yang memadai program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.3.3 Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

2.1.3.4 Struktur birokrasi, yaitu implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi terkait dengan karakteristik, norma dan pola hubungan dalam organisasi untuk melaksanakan kebijakan

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Menurut Wahab (2001 : 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Stoner (dalam Ambarwati 2018 : 1) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang dibawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.

Menurut James D. Mooney (dalam Ambarwati 2018 : 1) Mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Chester I. Bernard (dalam Ambarwati 2018 : 2) dalam bukunya “The Executive Function” berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Ambarwati 2018 : 2) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (Entity) sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ambarwati 2018 : 2) Mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompokan orang yang disebut dengan bawahan.

Menurut Malayu S. P. Hasibuan (dalam Ambarwati 2018 : 2) mengatakan organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi

dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Menurut Pradjudi Armo Sudiro (dalam Ambarwati 2018 : 2) mengatakan organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut James D. Mooney (dalam Ambarwati 2018 : 2) berpendapat bahwa *organization is the form of every human, association for the assignment of common purpose* atau organisasi adalah setiap bentuk kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Menurut Paul Preston dan Thomas Zimmerer (dalam Ambarwati 2018 : 2) mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (*organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common active objectives*).

Menurut Domick (dalam Umam, 2012 : 18) organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (*organization is the systematic bringing together of interdependent parts to form a unified whole through which authority, coordination and control may be exercised to achieve a given purpose*).

Menurut Robbins S.P (dalam Umam, 2012 : 18) mengatakan bahwa, Organisasi adalah sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (*organization is a consciously coordinated social units, composed of two or more people, that function on a relatively conditinous basis to achieve a common goal or set of goals*) (Gitosundarmo, I., dkk., 1997)

Menurut Hamim dan Indra Muchlis Adnan (2015 : 13) organisasi adalah sarana atau alat pencapau tujuan. Oleh karna itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2019 : 134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gomes (2013 : 23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang di pergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat di pasarkan.

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945. Landasan pemikiran dan pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa atau disebut dengan kata lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian pemerintahan desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa dengan baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat. memperdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup

Menurut Widjaja (2003 : 165) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dimuka pengadilan.

Rifhi Siddiq mendefinisikan desa sebagai area berpenduduk rendah dengan ikatan kemasyarakatan seragam, mayoritas agraris, dan kemampuan berinteraksi dengan wilayah lain.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1984 : 16) melihat desa sebagai kesatuan wilayah dengan penduduk menetap yang mampu menjalankan pemerintahan sendiri.

H.A.W. Widjaja (2003 : 3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa (meskipun referensi tahun 2003, konsep ini tetap menjadi landasan pemikiran utama). Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Paul H. Landis (1949 : 35) Desa didefinisikan sebagai ruang di mana hubungan sosial bercirikan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa. Ciri-cirinya mencakup pergaulan hidup yang saling kenal mengenal.

Rifhi Siddiq (2011 : 72) Desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, memiliki mata pencaharian dominan di sektor pertanian, serta berinteraksi dengan daerah lain di sekitarnya.

Pemerintahan desa berlandaskan keterbukaan, akuntabilitas profesionalitas, efektivitas, serta kewenangan dari hak asal usul, skala local, dan tugas pemerintah, Pembangunan desa dilakukan partisipatif dengan gotong royong, memanfaatkan kearifan local, dan sesuai rencana kerja pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Marwoto Soewito Tata pemerintahan desa mengandung makna sebagai kaidah dan tata aturan yang menjadi kerangka kerja maupun tata aturan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa.

2.1.6 Konsep Penyediaan Air Bersih

Pengertian air sangat beragam tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengatakan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

Sistem penyediaan air bersih merupakan suatu proses atau aktivitas penyediaan air meliputi pengadaan (sumber dan waduk), pengelolaan yaitu instalasi pengolahan air, dan pengiriman air bersih (tengki air, distribusi, penggunaan) *watter supply system* di dasarkan pada pemenuhan kebutuhan air bersih yang tergantung dari adanya pengololahan sumber air dan pengelolaan kualitas air. Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

Berikut ini adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam Program Penyediaan Air Bersih :

1. Persyaratan kualitatif

Persyaratan kualitatif ini menggambarkan mutu dan kualitas dari air baku air bersih, persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, kimia, biologi dan radiologis.

2. Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif ini dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Selain itu jumlah air yang dibutuhkan sangat tergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sebagai contoh negara-negara yang telah maju memerlukan air bersih yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang.

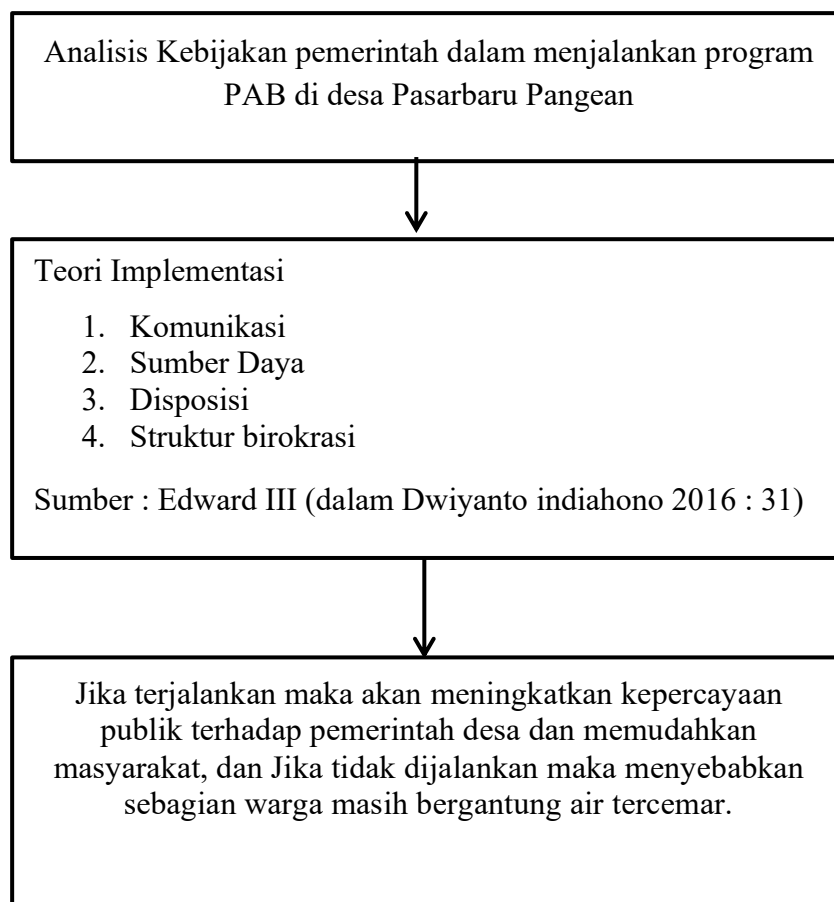
3. Persyaratan kontinuitas

Persyaratan kontinuitas untuk penyediaan air bersih sangat erat hubungannya dengan kualitas air yang tersedia, yaitu air baku yang ada di alam. Arti kontinuitas adalah air baku yang digunakan secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang diuraikan dalam telah pustaka, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian Analisis kebijakn pemerintah dalam menjalankan program Penyediaan Air Bersih di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran kebijakan pemerintah dalam menjalankan program PAB di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2025

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesisnya adalah menganalisa kebijakan pemerintah dalam menjalankan program PAB di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang masih kurang efektif

2.4 Defenisi Operasional

Operasional adalah penetapan atau pemberian makna suatu variable dengan cara merinci kegiatan atau tindakan yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel tersebut secara konkret dan dapat diamati. Definisi ini berfungsi agar variabel dapat diukur secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis.

2.4.1 Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik. Ini menjadi penting karna semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam pengaplikasian program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (dalam Dwiyanto indiahono 2016 : 31)

2.4.2 Sumber Daya

Sumber Daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial.

Sumber daya, manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang data melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial yang memadai program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran (dalam Dwiyanto indiahono 2016 : 31)

2.4.3 Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan (dalam Dwiyanto indiahono 2016 : 31)

2.4.4 Struktur birokrasi

Struktur birokrasi, yaitu implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi terkait dengan karakteristik, norma dan pola hubungan dalam organisasi untuk melaksanakan kebijakan (dalam Dwiyanto indiahono 2016 : 31)

2.5 Operasional Variabel

Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional dari suatu penelitian. Dalam hal ini, mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam

menjalankan program penyediaan air bersih didesa pasar baru pangean harus di spesifisikan terlebih dahulu.

Tabel II.I : Konsep Operasional Variabel tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program Penyediaan Air Bersih Didesa Pasar Baru Pangean

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Kebijakan pemerintah desa	Implementasi	1. Komunikasi	a. Kejelasan	Ordinal
			b. Tujuan	
		2. Sumber daya	a. Staff	Ordinal
			b. Finansial	
		3. Disposisi	a. Kejujuran	Ordinal
			b. Komitmen	
		4. Struktur birokrasi	a. Karakteristik	Ordinal
			b. Norma	

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2020 : 9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Informan

Sugiyono (2010 : 13) menyatakan informan adalah narasumber yang paham objek penelitian dan berperan kunci dalam pengumpulan data kualitatif.

Adapun Informan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Table III.I : Informan Penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah dalam menjalankan program PAB di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Unsur Informan	Jumlah	
		Informan	Key Informan
1	Kepala Unit PAB	1 Orang	1 Orang
2	Pengelola PAB	2 Orang	2 Orang
3	Pelanggan PAB	308 Orang	12 Orang
Total		311 Orang	15 Orang

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2025

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, Menurut Sugiyono (2019 : 133) Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam.

Teknik pengambilan informen pelanggan yang digunakan adalah *Simpel random sampling*, menurut Sugiyoni (2017 : 82) Menyatakan bahwa teknik ini di pilih karna anggota populasi dianggap homogen dan pengambilan dilakukan acak tanpa memperhatikan tingkatan.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil dari wawancara.

3.3.1 Sumber Data Primer

Menurut Istijanto (2006 : 11) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Menurut Istijanto (2006 : 11) data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, bukan peneliti sendiri dapat juga dikatakan sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang-orang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang kebijakan pemerintah dalam Menjalankan Program Penyediaan Air Bersih (PAB) di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah kantor PAB di jalan Jl. Jend. Sudirman, Pasarbaru, Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengambilan Data

3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiono 2018 : 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiono (2017 : 137) mengemukakan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020 : 51), dokumentasi adalah cara memperoleh data dan informasi dari catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang atau instansi. Metode dokumentasi

sering digunakan sebagai pelengkap pengumpulan data selain observasi dan wawancara.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiono (2017 : 241) menyatakan *triangulasi* adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu rangkaian proses sistematis seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, yang memungkinkan data yang dikumpulkan menjadi informasi bermakna dan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode ini menjadi dasar penting dalam setiap penelitian untuk mengelola dan menginterpretasikan data secara efektif dan sistematis agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nasution (dalam Sugiono, 2017 : 245) menyatakan bahwa teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau menganalisis data, Mengorganisasikan data memiliki dan memilahnya menjadi suatu yang diolah, dengan tiga komponen, yaitu

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data yaitu dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang serta mengesampingkan data yang tidak relevan.

Reduksi data berarti membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk

analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan keputusan. (dalam Umrati Hengki Wijaya, 2020: 106).

3.7.2 Sajian Data

Sajian data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. (dalam Umrati Hengki Wijaya, 2020: 106).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya (dalam Umrati Hengki Wijaya, 2020: 106).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																											
2	Pembuatan Proposal		X																										
3	Bimbingan Proposal			X				X	X		X																		
4	Seminar Proposal											X																	
5	Revisi Proposal													X															
6	Pembuatan Skripsi																					X							
7	Bimbingan Skripsi																								X	X	X		
8	Sidang Skripsi																											X	
9	Revisi Skripsi																												X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Penyediaan Air Bersih PAB

Pada umumnya kantor memiliki sejarahnya tersendiri, begitu juga dengan kantor PAB unit Pangean, sejarah merupakan kejadian-kejadian masa lampau yang di susun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa peninggalan itu disebut sumber sejarah. Kantor PAB unit Pangean yang berada di desa Pasarbaru, Kecamatan Pangean. Kecamatan Pangean merupakan kecamatan yang berada di bagian Hilir Sungai Kuantan atau sebelah Selatan dari kota Taluk Kuantan yang merupakan kecamatan yang di mekarkan dari kecamatan Kuantan Hilir di bagi menjadi 3 yakni kecamatan.

Kuantan Hilir dengan Ibukota Kecamatan Basrah Logas Tanah Darat dengan Ibukota Perhentian Luas dan Kecamatan Pangean dengan Ibukota Pasabarbaru Kecamatan Pangean yang berdiri pada tahun 1999, desa Pasarbaru memiliki 6 dusun yakni, Dusun Penghijaua, Pasar, Remaja, Bunga Tanjung, Pulau Bintang, dan Batamoncak.

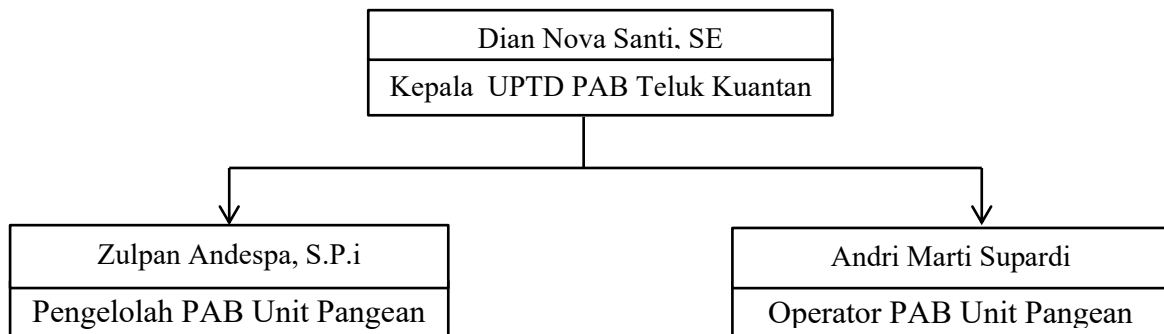
4.1.1 Gambar Struktur Organisasi

4.1.1.1 Kepala UPTD PAB Teluk Kuantan

4.1.1.2 Bidang Operator PAB

4.1.1.3 Bidang Pengelolah PAB

Gambar IV.I Struktur Organisasi PAB



Sumber : PAB Unit Pangean Tahun 2025

4.1.1.2 Ketua UPTD Teluk Kuantan

Tugas :

- 4.1.1.2.1 Menyusun rencana, Melakukan Koordinasi dan pengasawan seluruh kegiatan operasional PAB

Fungsi :

- 4.1.1.2.2 Menyusun rencana kegiatan dan laporan kegiatan PAB
- 4.1.1.2.3 Menyelenggarakan administrasi umum dan Kauangan

4.1.1.3 Bidang Operator PAB Unit Pangean

Tugas :

- 3.7.2.1.1 Menjalankan dan mengawasi sistem air, seperti pompa dan peralatan kontrol lainnya

Fungsi :

- 3.7.2.1.2 Memastikan pasokan air bersih yang kontinu dan stabil untuk semua tahapan proses produksi dan pembersihan peralatan.
- 3.7.2.1.3 Melakukan langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi air selama pengolahan dan distribusi, sehingga tidak membahayakan kualitas produk dan kesehatan konsumen

4.1.1.4 Bidang Pengelolah PAB unit Pangean

Tugas :

- 4.1.1.4.1 Melaksanakan pemberiann pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit organisasi PAB Unit Pangean

Fungsi :

- 4.1.1.4.2 Menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan air bersih
- 4.1.1.4.3 Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi pegawai, kauangan, kerja sama dan hubungan yang baik dengan pelanggan.

4.2 Kondisi Geografis PAB

PAB Unit Pangean, berada di Desa Pasarbaru Pangean dengan Topografi berbukit-bukit dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 103 Meter, curah hujan 3.340 Mm/Tahun suhu rata-rata 29⁰ celsius. Desa Pasarbaru Pangean dilalui oleh jalan raya Rengat-Teluk Kuantan sehingga posisi ini Desa Pasarberu sangat menguntungkan dalam pengembangan sector ekonomi. Luas wilayah desa Pasarbaru Pangean 630 Ha, dengan Jumlah penduduk 3882, laki-laki 1938 dan perempuan 1944 dengan jumlah kepala keluarga 1.051, adapun batas-batas wilayah desa pasarbaru Pangean sebagai berikut :

4.2.1 Sebelah Utara : Kecamatan Logar Tanah Darat

4.2.2 Sebelah Selatan : Desa Koto

4.2.3 Sebelah Timur : Kecamatan Kuantan Hilir

4.2.4 Sebelah Barat : Desa Sako

PAB Memiliki jumlah pelanggan 308 orang, yang berada di 5 dusun di desa Pasarbaru, kantor PAB Unit Pangean berada di Jl. Jend. Sudirman, Pasarbaru, Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi

4.3 Visi dan Misi Kanto PAB

4.3.1 Visi

Visi Merupakan Pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi akan di bawa dan bekarya agar tetap konsisten serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Adapun visi dari kantor PAB Unit Pangean yaitu :

4.3.1.1 Visi

“Menjadikan Penyediaan air bersih yang berkualitas dan pemenuhan kebutuha air rumah tangga masyarakat”

4.3.2 Misi

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga, instansi, perusahaan dalam usaha mewujudkan visi tersebut, misi juga dikatakan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan lembaga itu dibuat. Misi juga akan di berikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

4.3.2.1 Misi

4.3.2.1.1 Memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas dan terjangkau.

4.3.2.1.2 Menjunjung peningkatan kualitas air rumah tangga.

4.3.2.1.3 Memberikan kontribusi dalam peningkatan asli daerah

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada PAB di desa Pasar Baru Pangean tentang analisis kebijakan pemerintah dalam menjalankan program penyediaan air bersih di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengambil kesimpulan: kebijakan pemerintah dalam menjalankan program PAB telah dapat di laksanakan dengan baik karna antara pelaksana program (kebijakan) PAB dengan pelanggan PAB komunikasi telah berjalan dengan efektif dan efisien serta sasaran tujuan dan sasaran dari kebijakan telah terealisasi dengan baik namun terkait masalah finansial (keuangan) masih ada kendala dalam penyaluran dana secara tepat waktu.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang di uraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

6.2.1 Kepala UPTD PAB Teluk Kuantan

Diharapkan untuk selalu mengontrol pelaksanaan tugas pegawai/pengelola dengan baik dan untuk masalah finansial (keuangan) agar dalam penyaluran dana dan tagihan rekening harus tepat waktu supaya program bisa berjalan dengan efisien dan efektif.

6.2.2 Pegawai/pengelola PAB

Keahlian pegawai sangat diperlukan dalam proses menciptakan pelayanan yang baik oleh karena itu kompetensi pegawai dalam menghadapi pelanggan

seperti keluhan pelanggan, penyelesaian pipa bocor dan mesin rusak menjadi tanggung jawab yang sangat serius, pegawai harus bersikap sopan, ramah, mudah berkomunikasi dan sigap dalam melayani keluhan pelanggan. Dan memberikan pelayanan PAB yang lebih baik, merata, aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Pasar Baru Pangean. Serta sebaiknya dalam memberikan pelayanan yang baik penambahan kualitas SDM pegawai juga harus di perhatikan.

6.2.3 Pelanggan PAB

Diharapkan kepada pelanggan PAB di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat memenuhi kewajiban sebagai pelanggan yakni pembayaran tagihan rekening setiap bulannya dan hindari pemborosan (gunakan air secukupnya dan matikan kran jika tidak digunakan). Dan diharapkan jadilah pelanggan yang taat dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, 2025, *kebijakan publik* Penerbit Widina
- Budi Winarno. (2017). *Pemerintahan Desa dan Pembangunan Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dr.Arie Ambarwati, M.Pd. , *Perilaku dan Teori Organisasi*, 2018
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kalensum. (2016). *Tinjauan pustaka penyediaan air bersih*. Repository ITK.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD. *Kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus*, 2014.
- Radial, *pradigma dan model penelitian komunikasi* (Jakarta : PT. Bumu Askara, 2014), h.359
- Setiawati, L. (2024). *Pengelolaan program bantuan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat*. Welvaart Journal.
- Siagian, P. Sondang 2015. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksa
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit:CV Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu. 2018.*Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)* Jakarta: PT Bumi Aksara

- Widoyoko, E. P. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Konsep, Pendekatan, dan Strategi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, H. S. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. UIN Malang
- Zulkifli, 2009. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru. Universitas Islam Riau Press.

DOKUMENTASI



Foto Bersama Bapak Pengelola dan Operator PAB Unit Pangean



Foto Bersama Ibu Kepala UPTD PAB Kabupaten Kuantan Singingi



Foto Bersama Ibu Rosmanidar Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Ibu Suryanis Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Ibu Weli Agustin Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Ibu Ipit Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Ibu Rymi Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Ibu Leni Juita Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Ibu Selaku Pelanggan PAB



Foto Bersama Bapak Helmi Selaku Pelanggan PAB

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program
Penyediaan Air Bersih Di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi**

Kepada : Pengelolah Penyediaan Air Bersih

A. Identitas Peneliti

Nama : Dwi Indah Al Chalik
NPM : 220411023
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.

2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

A. Komunikasi (Kejelasan, Tujuan)

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan komunikasi yang jelas terkait PAB kepada pelanggan?

Jawaban:

.....

.....

.....

2. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan komunikasi yang jelas terkait tujuan PAB kepada pelanggan?

Jawaban:

.....

.....

.....

B. Sumber Daya (Staf, Finansial)

1. Apakah Bapak/Ibu sebagai pengelola PAB telah memiliki sumber daya yang cukup?

Jawaban:

.....

.....

.....

2. Apakah sumber daya keuangan PAB sudah memadai?

Jawaban:

.....

.....

.....

C. Disposisi (Kejujuran, Komitmen)

1. Apakah pengelola PAB sudah jujur (disiplin) dalam menjalankan tugasnya?

Jawaban:

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah komitmen antara Bapak/Ibu dengan pelanggan PAB mengenai penyaluran air bersih?

Jawaban:

.....

.....

.....

D. Struktur Birokrasi (Karakteristik, Norma)

1. Bagaimanakah karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai PAB?

Jawaban:

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah norma (perilaku) yang harus dimiliki oleh pegawai PAB
dalam menjalankan mitra dengan pelanggan?

Jawaban:

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program
Penyediaan Air Bersih Di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi**

Kepada : Pelanggan (Masyarakat) Penyediaan Air Bersih

A. Identitas Peneliti

Nama : Dwi Indah Al Chalik
NPM : 220411023
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.

2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

A. Komunikasi (Kejelasan, Tujuan)

1. Apakah pihak PAB sudah melakukan komunikasi yang jelas terkait PAB kepada pelanggan?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

2. Apakah pihak PAB sudah melakukan tujuan PAB kepada pelanggan?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

B. Sumber Daya (Staf, Finansial)

1. Apakah Bapak/Ibu pegawai PAB sudah memadai dalam melaksanakan tugas?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

2. Apakah pembayaran keuangan pelanggan PAB sudah memadai?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

Disposisi (Kejujuran, Komitmen)

1. Apakah pengelola PAB jujur (disiplin) dalam menjalankan tugasnya?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana komitmen Bapak/Ibu dengan pengelola PAB mengenai air bersih?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

C. Struktur Birokrasi (Karakteristik, Norma)

1. Bagaimanakah karakteristik yang dimiliki oleh pegawai PAB?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah norma (perilaku) yang dimiliki oleh pegawai PAB dalam menjalankan mitra dengan pelanggan?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:143/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Nama : DESRIADI, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
 - b. Nama : ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dwi Indah Al Chalik

NPM : 220411023

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program Penyediaan Air Bersih (PAB) di Desa Pasarbaru Pangan Kab. Kuantan Singingi

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025
 Dekan,

SARJAN M. S.Sos., M.Si
 NIDN: 1008128002

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD PENYEDIAAN AIR BERSIH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dusun Luar Parit, Desa Koto Teluk Kuantan, Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 410/UPTD-PAB/IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lengkap : DWI INDAH AL CHALIK
Nim : 220411023
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas : ILMU SOSIAL
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Dasar : Surat Rekomendasi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 35/DPMTSPK-PTSP/1.04.02.02/2026 tanggal 27 Januari 2026.

Telah melaksanakan penelitian / riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul " **ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DIDEASA PASAR BARU PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI.**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 20 April 2026

**KEPALA UPTD PENYEDIAAN AIR BERSIH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



DIAN NOVA SANTI SE
NIP. 19820805 200701 2 002



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Uniskskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : DWI INDAH AL CHALIK
NPM : 220411023
DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. DESRIADI, S.Sos., M.Si
2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENJALANKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH
(PAB) DI DESA PASARBARU PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI.

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	26/11/2025	Perbaiki keseluruhan proposal		Aaf	
2.	18/12/2025	Sistematika penulisan		Aaf	
3.	23/12/2025	Pertambahan Teori		Aaf	
				Aaf	
				Aaf	

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Indah Al Chalik
 NPM : 220411023
 Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program
 Penyediaan Air Bersih Di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten
 Kuantan Singingi.

Pembimbing 1 : Desriadi, S.Sos., M.Si

Pembimbing 2 : Alsar Andri, S.Sos., M.Si

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	Senin 2/2 26.	Perbaiki sesuai saran		Ay	
2.	Senin 30/3 26	Perbaiki sesuai saran		Ay	
3.	Selasa 31/3 26	Perbaiki sesuai saran		Ay	
4.	PARU 1/4 26	ACC		Ay	
5.	Rabu 2/4 26	see	—		
6.	Senin 14/04 26			Ay	
				Ay	
				Ay	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subrata 10M, Ombun Kuning, Jaka Telp 0760 361655, e-mail info@uiks.ac.id

Form 12

PERSetujuan PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposisi Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Dwi Indah Al Chalik

NPM : 220411023

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program Penyediaan
 Air Bersih di Desa Pasar Baru Pangean Kab. Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 22 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharram, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Denrindi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alfar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Ditulis di hadapan sidang forum dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa sebagai penanggung jawab proposal yang hasil
 nilai sidang skripsi dan diberikan kepada penanggung jawab / (nama) barunya dengan persetujuan lainnya



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Dwi Indah Al Chalik

NPM : 220411023

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan Program Penyediaan Air Bersih di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 11 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Anggota 1	4.
5.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dwi Indah Al Chalik
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasarbaru/01 Juli 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Kawin
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Bunga Tanjung Desa Pasarbau Pangean
 Alamat Email : dwindahalchalik@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2016 LULUS MIN Pangean
 2. Tahun 2019 LULUS MTS Negeri 1 Kuantan Singingi
 3. Tahun 2022 LULUS MAN 2 Kuantan Singingi

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 17 April 2026

Penulis

Dwi Indah Al Chalik
NPM.220411023



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Januari 2026

Nomor : 013/FIS/UNIKS/1/2026
 Lamp. : -
 Perihal : **Permohonan Riset**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman
 Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Indah Al Chalik
 NPM : 220411023
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Program Studi : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjalankan
 Program Penyediaan Air Bersih di Desa Pasar Baru
 Pangean Kab. Kuantan Singingi
 Lokasi Penelitian : 1. Desa Pasar Baru Pangean
 2. Dinas PUPR

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


SARIAN M. S. Sos. M. Si
 NIDN/ 1008128002